

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam suatu jenjang pendidikan, karena dalam mata pelajaran PKn perkembangan moral dan budi pekerti siswa sebagai warga negara yang baik sangat ditekankan.

Pendidikan Kewarganegaraan sebelumnya dikenal dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang selanjutnya diganti dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) namun selanjutnya diganti dengan nama PKn sampai dengan saat ini.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama dari suatu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan berusaha membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat mewujudkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan Modul Kapita Selekta PKn (Standar Isi BSNP 2006:7) pengertian PKn adalah

:

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa PKn merupakan suatu mata pelajaran yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela Negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia agar menjadi warga negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan dapat diandalkan bangsa dan negara.

Menurut M Daryono (1997:1) Pendidikan Kewarganegaraan adalah “nama dari suatu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah”.

Menurut kurikulum 2004 Paradigma Baru pasca KBK (2003:2) “Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu mata pelajaran yang terdapat dalam sekolah yang berusaha membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat diwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan produk Lembaga Tertinggi Negara Tahun 1973. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan konsekuensi dari pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, secara yuridis formal telah diterima sebagai dasar negara. Konsekuensi dari pernyataan tersebut ialah bahwa dalam penyelenggaraan negara selagi gerak langkahnya harus sejalan dan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Ki Hadjar Dewantara (1950:1 dan 4) mengatakan bahwa “di dalam Pancasila dapat dikemukakan sifat-sifat pokok dari kehalusan dan keluhuran budi manusia”.

Jalur sekolah adalah salah satu wahana strategis untuk mengembangkan dan mencapai tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang menyatukan pengembangan ranah pengetahuan, keterampilan, serta sikap, dan nilai untuk mengembangkan kepribadian dan perwujudan dari anak didik.

Hal ini disebabkan karena sekolah, memiliki program terarah dan terencana, serta memiliki komponen-komponen pendidikan yang saling berinteraksi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan.

Demikian juga saling berperannya berbagai mata pelajaran yang secara integratif membina tercapainya sifat-sifat yang diharapkan dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia yang terdidik.

Sebagai mata pelajaran, PKn membawa misi khusus dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan yang pencapaiannya dibebankan kepada mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran PKn, adalah membimbing generasi muda untuk memahami dan menghayati Pancasila secara keseluruhan dan setiap sila darinya (*Kerangka Program PKn*).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah suatu usaha sadar, yang terencana dan terarah, melalui pendidikan formal, untuk mentransformasikan dan mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada anak didik. Pengembangan nilai dimaksudkan anak didik dapat mencerna melalui akalinya, dan menumbuhkan rasionalitas sesuai dengan kemampuannya mengembangkan rasionalitas tentang nilai Pancasila, sehingga anak akan mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berusaha membentuk manusia Indonesia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian Pancasila, yang mampu melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila. Maka PKn menduduki tempat yang sangat sentral dan strategis dalam konstelasi pendidikan nasional.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Menurut M. Daryono dkk (1997:29) “ Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berusaha membentuk manusia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian bangsa, yang

melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila, tanpa PKn, segala kepintaran atau akal, ketinggian ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecekatan, tidak memberikan jaminan pada terwujudnya masyarakat Pancasila”.

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa PKn mempunyai kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak bisa lepas dari pendidikan nasional, dalam arti merupakan satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan nasional.

Menurut kurikulum 2004 Paradigma Baru PKn berdasarkan standar isi BSNP (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 2) Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

1. Berpikir secara kritis rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis berkembang diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dan dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam modul Kapita Selekt PKn (2006:7) secara eksplisit tercantum tujuan kurikuler PKn adalah kelima Pancasila, yaitu sebagai berikut :

1. Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila persatuan Indonesia.

4. Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari rumusan tujuan kurikuler tersebut, yang sangat jelas menggunakan istilah: memahami, menghayati, dan mengamalkan, maka berarti bahwa tujuan PKn itu meliputi:

- a. Aspek kognitif (pengetahuan, memahami), kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berfikir/nalar.
- b. Aspek afektif (nilai, menghayati), kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya..
- c. Aspek psikomotor (perilaku, mengamalkan), kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi system syaraf dan otot (*neuronmuscular system*) dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari : (a) kesiapan (*set*); (b) peniruan (*imitation*); (c) membiasakan (*habitual*); (d) menyesuaikan (*adaptation*) dan (e) menciptakan (*origination*).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah mendidik peserta didik untuk dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara republik Indonesia, terdidik dan bertanggung jawab.

Dan pendidikan kewarganegaraan yang dimanifestasikan di dalam kurikulum sekolah ialah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

3. Misi dan Visi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan pasca KBK memiliki karakteristik pendidikan pengajarannya, sehingga ia mengemban misi (Standar isi BSNP) :

1. Mengembangkan kerangka berpikir baru yang dapat dijadikan landasan yang rasional untuk menyusun PKn baru, sebagai pendidikan intelektual kearah pembentukan warga negara yang demokratis. Misi tersebut dilakukan melalui penetapan kemampuan dasar PKn, sebagai landasan penyusunan standar kemampuan serta standar minimum yang ditetapkan secara rasional.
2. Menyusun substansi PKn baru sebagai pendidikan demokrasi yang berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta dalam konteks politik, kenegaraan, dan landasan konstitusi yang dituangkan dalam sila-sila demokrasi Indonesia. Misi tersebut dilakukan melalui penyusunan uraian materi pada masing-masing standar materi PKn yang dapat memfasilitasi berkembangnya pendidikan demokrasi.

Sedangkan visi PKn menurut standar isi BSNP ialah (Tim Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006) :

“Mewujudkan proses pendidikan yang integral di sekolah untuk pengembangan kemampuan dan kepribadian warga negara yang cerdas, partisipasif dan bertanggung jawab yang pada gilirannya akan menjadi landasan untuk berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis”.

Dari misi dan visi tersebut, sangat jelas bahwa untuk membentuk warga negara yang baik sangat dibutuhkan kosep pendidikan yang demokratis yang diartikan sebagai tatanan konseptual yang menggambarkan keseluruhan upaya sistematis untuk mengembangkan

cita-cita, nilai-nilai, prinsip, dan pola perilaku demokrasi dalam diri individu warga negara dalam tatanan iklim yang demokratis.

4. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pada bagian yang lain dalam Paradigma Baru PKn (Tim Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 2006:11) disebutkan juga fungsi Pendidikan Kewarganegaraan.

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan adalah :

1. Mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila secara dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat
2. Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik dan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945
3. Membina pengalaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dengan negara, antara warga negara dengan sesama warga Negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan suatu wahana yang berfungsi melestarikan nilai luhur Pancasila, mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya serta membina pengalaman dan kesadaran warga negara untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dapat bertanggung jawab dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Seperti halnya mata pelajaran lain, mata pelajaran PKn di sekolah memiliki rambu-rambu dalam proses pembelajarannya. Rambu-rambu ini berfungsi untuk menjadi acuan guru mata pelajaran PKn dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif.

Berdasarkan modul Kapita Selekta PKn (Standar Isi BSNP 2006:14) disebutkan bahwa :

Rambu-rambu pembelajaran PKn yaitu :

1. Membina tatanan nilai moral Pancasila secara utuh, bulat dan berkesinambungan sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa dan perjanjian luhur bangsa Indonesia.
2. Wujud pembinaan dalam garis-garis besar proses pembelajaran PKn melalui pembinaan konsep nilai moral Pancasila.
3. Membudayakan Pancasila secara dini, terprogram dan terus menerus.
4. Garis-garis besar proses pembelajaran PKn adalah salah satu perangkat kurikulum dan pedoman bagi guru.
5. Garis-garis besar proses pembelajaran PKn merupakan program minimal yang diorganisasikan ke dalam sistem semester, jatah waktunya 16 kali pertemuan.
6. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam garis-garis besar proses pembelajaran PKn adalah nilai-nilai dasar Pancasila yang dijabarkan ke dalam nilai instrumental.
7. Rumusan tujuan PKn setiap kelas mengandung nilai moral Pancasila yang harus dikembangkan pada tingkat atau kelas dalam bentuk tujuan instruksional khusus.
8. Prinsip penyajian nilai dimuali dari mudah ke sukar, sederhana ke rumit, konkrit ke abstrak, lingkungan kehidupan siswa.
9. Penentuan kegiatan belajar mengajar didasarkan pada kebermanfaatan, kedekatan, dan harapan masyarakat, bangsa dan negara.
10. Uraian setiap pokok bahasan mencakup dua proses, yaitu pengenalan nilai, dan pembahasan atau pengamalannya.
11. Melakukan hubungan, bebas memilih strategi, metode dan media serta evaluasi, yang melibatkan orang tua dan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, mata pelajaran PKn merupakan suatu mata pelajaran yang mementingkan perubahan pada tingkah laku siswa, sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajarannya harus terfokus pada siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut seorang guru harus dapat mengembangkan segala kemampuan yang ia miliki, dengan tetap berpatokan pada

rambu-rambu pembelajaran yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan pembelajaran.

5. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Semua pendidikan yang dirancang tentulah mempunyai tujuan nasional, tujuan pendidikan khusus (misalnya pendidikan tinggi), tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Tujuan-tujuan itu semua dibuat berdasarkan suatu rumusan yang jelas dan terukur bermuara pada perubahan-perubahan segi sistem berfikir, pengetahuan, keterampilan dan sikap anak didik seperti apa yang hendak dicapai setelah mereka berhasil dengan baik menyelesaikan pendidikannya.

Upaya utama yang dapat mencapai perubahan-perubahan segi sistem berfikir, pengetahuan, keterampilan dan sikap anak didik antara lain ialah melalui proses belajar-mengajar (pembelajaran) dan kegiatan akademik lainnya baik yang direncanakan maupun spontan.

Mengusahakan terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif yang menunjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang tenang dalam lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Namun pengaruh guru pada perubahan-perubahan segi sistem berfikir, pengetahuan, keterampilan dan sikap anak didik amatlah besar karena berlangsung atau tidaknya proses pembelajaran (belajar-mengajar) secara

benar, bergantung pada pribadi dan tingkat kecerdasan guru, sedangkan unsur lainnya berfungsi sebagai penunjang belaka.

Demikian halnya dengan proses pembelajaran (belajar-mengajar) PKn, proses pembelajaran PKn adalah proses menyampaikan, menanamkan, mengembangkan, dan mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 kepada anak didik agar menjadi manusia dan warga Negara Indonesia yang berkarakter dan demokratis.

Berdasarkan Paradigma Baru PKn yang dituangkan dalam Standar Proses PKn (2006:95), Proses pembelajaran PKn memuat uraian tentang :

1. Tujuan (*instructional objectives*) mata pelajaran yang dirumuskan berupa ramuan dari sumber bahan yang diangkat dari rasionel program.
2. Pengalaman belajar (*learning experiences*) yang direncanakan baik menyangkut bidang teori, praktikum maupun pengalaman di lapangan.
3. Topik dan Sub-topik yang akan disajikan, yang dianggap penting dan esensial sebagai bahan ajar (*instructional materials*) yang akan dijadikan pembekalan yang cocok untuk pelaksanaan spektrum tugas mendukung kompetensi yang diharapkan.
4. Cara dan Teknik penyajian (*course offering style*) yang dipilihkan dan serasi dengan sifat dan cirri bahan ajar.
5. Takaran waktu yang dianggap memadai untuk penyajian bahan ajar baik yang bersifat klasikal, laboratorer maupun kerja lapangan (*field work*) dan,
6. Bahan sumber yang cocok sebagai buku-dasar (*text book*), maupun referensi guna pengayaan (*enrichment*) melengkapi bahan ajar.

Mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui:

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaran pasca KBK (Standar isi BSNP):

- a. *Civics Intellegence*, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial.
- b. *Civics Responsibility*, yaitu kecerdasan akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dan
- c. *Civics Participation*, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.

Hakikat mata pelajaran PKn merupakan suatu upaya untuk mengartikan, menyalurkan, dan membina peran warga negara dari berbagai aspek kehidupan agar terbentuk sebagai warga negara yang baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. serta memiliki tujuan dan program yang sejalan dengan upaya pembentukan manusia dan warga negara Indonesia yang berkarakter dan demokratis. Maka PKn memiliki peranan yang sangat besar dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, pembelajaran PKn diharapkan dapat mentransformasikan, menanamkan, mengembangkan, serta mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

6. Pengertian dan Perlunya Nilai-nilai Demokrasi dalam Berbagai Aspek

Kehidupan.

Demokrasi berasal dari kata Yunani, *demos* dan *kratos*. *Demos* mempunyai arti rakyat, dan *kratos* berarti pemerintahan.

Secara keseluruhan demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Di dalam *The Advancced*

Learner's Dictionary of Current English oleh Hornby. M.(PKn untuk mahasiswa, 2006:56) bahwa yang dimaksud dengan *democracy* adalah :

1. *country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives.*
2. *country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities.*
3. *society in which there is treatment of each other by citizens as equals.*

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih, pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan *rule of law*, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, mengintegrasikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki sebelas pilar, yakni :

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan Hak Asasi Manusia
6. Pemilihan yang bebas dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai: “gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara”.

Hasbullah (2006: 49-51) mengemukakan demokrasi dalam pengertian lebih luas, patut dianalisa sehingga memberikan manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan yang paling tidak mengandung hal-hal sebagai berikut :

a. Rasa Hormat terhadap Harkat Sesama Manusia

Dalam hal ini demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan memandang perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya, baik hubungan antara sesama peserta didik atau hubungan antara peserta didik dengan gurunya yang saling menghargai dan menghormati.

b. Setiap Manusia Memiliki Perubahan ke Arah Pikiran yang Sehat

Acuan inilah yang melahirkan adanya pandangan bahwa manusia itu haruslah dididik. Dengan pendidikanlah manusia akan berubah dan berkembang kearah yang lebih sehat dan baik serta sempurna.

Oleh karena itu, sebagai lembaga pendidikan sekolah diharapkan dapat mengembangkan anak didik untuk berfikir dan memecahkan persoalan-persoalan sendiri secara teratur, sistematis dan komperhensif serta kritis sehingga anak memiliki wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. Tentunya dalam proses seperti ini diperlukan sikap yang demokratis dan tidak terjadi pemaksaan pandangan terhadap orang lain.

c. Rela Berbakti untuk Kepentingan dan Kesejahteraan Bersama

Dalam konteks ini, pengertian demokrasi tidaklah dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain. Dengan kata lain, seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Norma-norma atau aturan serta tata nilai yang terdapat di masyarakat itulah yang membatasi dan mengendalikan kebebasan setiap orang. Untuk itu, warga negara yang demokratis akan dapat menerima pembatasan kebebasan itu dengan rela hati. Artinya tiap-tiap warga negara hendaklah memahami kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara dari suatu negara demokratis yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Berkenaan dengan itulah maka bagi setiap warga negara diperlukan hal-hal berikut ini :

- a. pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah kewarganegaraan, kemasyarakatan, dan soal-soal pemerintahan yang penting.
- b. Suatu keinsyafan dan kesanggupan semangat menjalankan tugasnya, dengan mendahulukan kepentingan negara atau masyarakat daripada kepentingan sendiri atau kepentingan sekelompok kecil manusia.
- c. Suatu keinsyafan dan kesanggupan memberantas kecurangan-kecurangan dan perbuatan-perbuatan yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran masyarakat dan pemerintah.

Yang paling utama dalam berlakunya demokrasi di suatu negara ialah ada atau tidaknya asas-asas demokrasi, yaitu ;

1. Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.

2. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah, jika dukungan rakyat tidak ada, sulitlah bahwa pemerintah itu adalah suatu pemerintahan demokrasi.

Menurut Fraenkel (1981:13) “nilai ini adanya dalam diri atau jiwa manusia, serta berlainan satu dengan lainnya”. Sedangkan menurut Rokeah (2003:22) “nilai adalah sesuatu yang berharga, yang dianggap bernilai, adil, baik dan indah serta menjadi pedoman atau pegangan diri”.

Nilai-nilai demokrasi secara formal konstitusional terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yakni “...mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” (alinea 2); “...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” (alinea 3); “...maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan...” (alinea 4).

Atas dasar asas tersebut di atas, maka Henry B. Mayo (1990: 46) merincikan nilai-nilai dalam demokrasi, sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman

6. Menjamin tegaknya keadilan.

Jelaslah bahwa dalam upaya merealisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, pendidikan kewarganegaraan menjadi sedemikian penting untuk ditanamkan kepada setiap siswa.

Dengan demikian, tampaknya demokrasi merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

7. Materi Demokrasi dalam Kurikulum Sekolah

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang tersusun secara hierarkis dan memuat konsep-konsep yang saling berkaitan, antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia agar menjadi warga negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan dapat diandalkan bangsa dan negara.

Munurut Modul Kapita Selekt PKn (2006:16), disebutkan bahwa di dalam mata pelajaran PKn terdapat beberapa dimensi dari Pendidikan Kewarganegaraan, beberapa dimensi tersebut ialah:

Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan :

1. Dimensi Hukum, dalam dimensi ini memuat segala aspek dan perkembangan hukum yang ada di Indonesia yang menekankan pada asas “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan yang berdasarkan hukum, dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka”.
2. Dimensi Politik, pada dimensi ini dibahas semua masalah politik atau isu-isu yang berkembang di dalam dan luar negara, dimensi politik ini akan memberikan pengetahuan yang luas mengenai politik perkembangan negara, sejauh mana politik di Indonesia ini sudah berkembang dengan baik.
3. Dimensi Watak Warga Negara, dalam dimensi ini membahas dan menelaah mengenai keterampilan warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar dapat menjadi pribadi yang tangguh, bertanggungjawab, mempunyai paham kebangsaan, dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
4. Dimensi Kenegaraan, dimensi kenegaraan membahas segala aspek yang berhubungan dengan susunan pemerintahan, ketatanegaraan, dan segala aspek yang berhubungan dengan tata pemerintahan atau tata Negara Indonesia, baik dari pemerintahan pusat sampai pada pemerintahan yang ada di daerah.
5. Dimensi Moral, dimensi ini lebih dalam menyentuh dan menyelami moral atau tingkah laku warga negara sebagai insan dan individu yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan berbnegara yang harus dapat saling menghormati dan menghargai individu lainnya sebagai teman hidu bersama di dunia ini.

Materi Demokrasi adalah pokok bahasan yang terdapat pada kurikulum sekolah menengah pertama kelas VIII semester genap dan termasuk dalam dimensi pendidikan kewarganegaraan. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan materi demokrasi merupakan materi prasyarat untuk materi selanjutnya, misalnya materi demokrasi yang dipelajari pada tingkat SMP akan ditampilkan kembali pada tingkat SMA dalam materi sistem politik indonesia yang di dalamnya mencakup pelaksanaan sistem politik yang berlaku di Indonesia. Materi demokrasi adalah materi atau pokok bahasan yang bersumber pada sila keempat dari Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Dari penjabaran di atas tersebut, maka sikap demokrasi memang sudah seharusnya telah tertanam dalam benak warga negara dan dapat diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sekolah formal dicirikan dengan adanya kurikulum yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kependidikan (SD,SMP,SMA). Konsep atau materi yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa harus disesuaikan dengan tingkat kependidikan siswa menurut kurikulum yang berlaku, dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan penguasaan konsep karena tidak sesuai dengan tingkat kematangan siswa.

Hal ini diungkapkan juga oleh Wibowo dkk (1997:11) yang menyatakan bahwa : “Apabila murid tidak memahami suatu konsep salah satu kemungkinannya adalah murid tersebut belum sampai pada tingkat kematangan (*mature*) tertentu yang sesuai dengan tingkat kesukaran konsep”.

Telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam standar isi pendidikan kewarganegaraan SMP/MTS bahwa standar kompetensi pada materi demokrasi adalah “Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan”, sedangkan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa adalah “ menjelaskan hakikat demokrasi, menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan”.

Maka dalam pelaksanaannya pada kurikulum pendidikan pada mata pelajaran PKn, setelah menerima materi atau pokok bahasan demokrasi oleh gurunya siswa diharapkan mampu untuk memahami penjelasan materi demokrasi .

B. Kerangka Pikir

Setelah memberikan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep utama dengan teori, yang akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir merupakan instrumen yang memberikan penjelasan bagaimana upaya penulis memahami pokok masalah.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang mentransformasikan, menanamkan, serta mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, salah satu pilar dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 adalah pengembangan demokrasi. Sikap demokrasi adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, dalam menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi yaitu: mengutamakan kepentingan sekolah, mengutamakan kepentingan bersama dan rela berkorban untuk kepentingan bersama, toleran atau menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda, terbuka menerima pendapat orang lain, tanggap dan berani mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, bersikap kritis terhadap informasi atau pandangan sehingga tidak mudah menerima dan menolak pandangan orang lain, cerdas dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan, menghormati hak orang lain, serta menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab; mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting.

Maka berdasarkan permasalahan dan kajian teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka disusun kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 3 :Diagram Kerangka Pikir

